

Dini Anggraeni Dilantik Jadi Kadinkes Kota Tangerang

TANGERANG (IM) - Dokter Dini Anggraeni secara resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Kamis (23/9).

Dini Anggraeni yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tersebut dilantik Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin.

“Posisi Kadinkes penting untuk segera diisi, mengingat saat ini Pemkot Tangerang tengah melakukan sejumlah kegiatan dalam kaitan penanganan Covid-19,” ujarnya di ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota

Tangerang. Selain Dini Anggraeni, ada 67 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang juga dilantik untuk mengisi sejumlah kekosongan jabatan serta rotasi sejumlah pejabat. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang dijabat dr Darto.

Dengan pengisian sejumlah jabatan serta rotasi yang dilakukan, diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Di mana pun bertugas tetap junjung tinggi profesionalitas dan semangat melayani untuk masyarakat,” pungkasnya. ● pp

SEBUT STOK MASIH KURANG

Wagub Banten Minta Pusat Prioritaskan Pasokan Vaksin

SERANG (IM) - Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy meminta Pemerintah Pusat turut memprioritaskan pasokan vaksin Covid-19 untuk daerah-daerah penyangga Ibu Kota, tak hanya DKI Jakarta. Hal itu sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa angka vaksinasi di sejumlah daerah di Provinsi Banten masih rendah.

“Memang distribusi dari pusatnya masih terbatas. Kalau kami di provinsi, Pusat kirim berapa yang langsung kami distribusikan ke kabupaten/ kota,” ujar Andika dalam keterangan resmi, Kamis (23/9).

Dia mengatakan, dari target sekitar 18 juta dosis vaksinasi Covid-19 di Provinsi Banten, Pemerintah Pusat baru mengalokasikan kurang lebih 8,5 juta dosis. Sehingga jumlah dosis vaksin yang dibutuhkan di sejumlah daerah di Banten atau wilayah-wilayah penyangga Ibu Kota masih sangat kurang.

“Targetnya kan 70 persen penduduk, jadi sekitar 9 juta penduduk, artinya kita butuh 18 juta dosis untuk meng-cover dua kali dosis. Sementara alokasi dan distribusi dari

Pusat untuk Banten baru 8,5 juta dosis,” terangnya.

Andika berpendapat, prioritas Pemerintah Pusat kepada DKI Jakarta selama ini tidak akan berjalan dengan baik hasilnya jika daerah penyangganya tidak ikut diprioritaskan. Dia meminta agar alokasi dan distribusi vaksin untuk Banten dapat lebih ditingkatkan.

“Kan percuma kalau Jakarta clear juga, kalau orang Tangerang yang banyak beraktivitas di Jakarta belum ter-cover (vaksin Covid-19),” ucap dia.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten mencatat, pelaksanaan vaksinasi dosis satu di Provinsi Banten saat ini telah menjangkau sebanyak 3,6 juta lebih sasaran atau tercapai 39,56 persen dari target sebanyak lebih dari 9,2 juta jiwa. Adapun, capaian vaksinasi dosis dua baru menasar kepada sekitar 2 juta jiwa atau 20,55 persen dari target.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya capaian vaksinasi di sejumlah daerah di Provinsi Banten. Ada beberapa kabupaten/ kota di Banten yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20 persen. ● pra



VAKSINASI DARI RUMAH KE RUMAH

Petugas medis memeriksa kesehatan seorang peserta saat vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah di Soropadan, Pringsurat, Temanggung, Jateng, Kamis (23/9). Untuk percepatan vaksinasi Covid-19 pemerintah kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) melaksanakan vaksinasi dari rumah ke rumah.

EKS PENGIKUT ‘HAKEKOK’ HUNI RUMAH BARU

Bupati Pandeglang: Jangan Sampai Mereka Diasingkan

Bantuan ini dimaksudkan agar supaya mereka hidup bersosial dengan baik. Jangan sampai ke depan mereka merasa diasingkan dan dikhawatirkan mereka akan kembali kepada perilaku-perilaku yang menyimpang,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

PANDEGLANG (IM) - Belasan mantan pengikut aliran ‘Hakekok Balaksuta’ akhirnya bisa memulai lembaran hidup yang baru. Mereka pun mendapat bantuan rumah layak huni di dua kecamatan yaitu di Cigeulis dan Cimanggung, Pandeglang, Banten supaya bisa hidup berdampingan lagi dengan masyarakat sekitar.

Bantuan rumah itu diketahui berasal dari program Yayasan Baitulmaal Muamalat

bersama Bank Muamalat Indonesia. Tercatat, ada enam kepala keluarga eks pengikut aliran ‘Hakekok’ yang mendapat program rumah baru tersebut. “Bantuan ini supaya mereka hidup bersosial dengan baik. Jangan sampai ke depan mereka merasa diasingkan karena dikhawatirkan mereka akan kembali kepada perilaku-perilaku yang menyimpang,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita kepada wartawan saat

ditemui di kantornya, Kamis (23/9).

Penyerahan bantuan rumah baru ini digelar secara daring dan luring. Bahkan, tokoh kharismatik asal Pandeglang yaitu Abuya Muhtadi ikut hadir secara langsung di Kecamatan Cigeulis saat penyerahan berlangsung.

“Hadirnya bantuan ini tentu sangat bermanfaat karena sebagai upaya untuk memperbaiki taraf hidup bagi eks pengikut aliran balakasuta,” ungkap Irna.

Selain rumah, Pemkab Pandeglang juga memberikan program permodalan ekonomi untuk eks pengikut aliran ‘Hakekok’. Di antaranya program kelompok usaha bersama (Kube) untuk dua kelompok di Cimanggung dan Cigeulis dengan masing-masing bantuan se-

besar Rp 10 juta.

“Pemkab juga pastikan terus melakukan pemantauan dan pembinaan untuk eks pengikut aliran ini, supaya mereka bisa kembali ke pedoman Al-Quran dan Hadits. Mudah-mudahan ke depan aliran menyimpang seperti ini tidak muncul kembali di Pandeglang,” tuturnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat, Novi Wardi menyebut, pembangunan rumah bagi enam KK ini dibuat melalui bantuan dengan total Rp 332,9 juta. Anggarannya pun berasal dari kontribusi Bank Muamalat da para donatur di lembaganya.

“Alhamdulillah, meski kondisinya sedang pandemi, kami bisa memfasilitasi kebutuhan dasar mantan para pengikut aliran Balakasuta

melalui pembangunan rumah baru. Mudah-mudahan ke depan, mereka bisa kembali ke kehidupan sesuai ajaran Agama Islam yang benar,” katanya.

Senada, Direktur Utama Bank Muamalat, Achmad K. Permana juga berharap program rumah harapan ini bisa bermanfaat bagi para mantan pengikut aliran ‘Hakekok’. Setidaknya, kata dia, mereka bisa memulai kehidupan yang baru di rumah tersebut sesuai ajaran Agama Islam.

“Kami tentunya sangat bahagia akhirnya program ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan rumah yang telah dibangun memberikan manfaat bagi penerimanya, Insya Allah ini akan menjadi catatan amal ibadah kita bersama,” pungkasnya. ● pra

Sampah Liar di TPSL Bantaran Sungai Cisadane Berasal dari Luar Tangerang

TANGERANG (IM) - Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Liar yang terdapat di bantaran sungai Cisadane wilayah Kecamatan Nglasari masih beroperasi.

Pemerintah Kota (Pemkot) hingga kini belum melakukan penindakan untuk menghentikan aktivitasnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (BBWSCC), Bambang Heri Mulyono menegaskan aktivitas TPS liar itu menyalahi aturan yang berlaku.

Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan danau.

“Yang pasti TPS itu jelas menyalahi aturan, kita sudah layangkan surat. Untuk penindakannya kita minta bantuan Pemda. Kami kan gak punya perangkat untuk menindak,” tegasnya Kamis, (23/9).

Seperti diketahui, saat ini

terdapat lima TPSL di bantaran sungai Cisadane wilayah Kecamatan Nglasari dengan luas sekira 4000 hingga 6000 ribu meter persegi.

Lima TPSL itu tepatnya berada di Gang Kebon Jeruk, Gang Loncong, RT 004 RW 002 yang berdekatan dengan krematorium rawa kucing, RT 005 RW 001 dan RT 01 RW 01 kedaung Baru.

Dari informasi yang diperoleh TPSL tersebut sudah beroperasi sejak 2008 dan diduga juga menampung sampah dari luar Kota Tangerang.

Selain BBWSCC, komunitas pencinta alam Saba Alam Indonesia Hijau (SAIH) juga telah melayangkan surat serupa ke Walikota Tangerang, Arief Wisnansyah.

Bambang menuturkan pihaknya juga telah melakukan peninjauan beberapa waktu lalu ke lokasi tersebut. Hasilnya, potensi pencemaran sungai kata Bambang sangat tinggi. Maka itu, harus segera

ditutup.

“Kita melihat itu melanggar sempadan lah. Dan kan itu mengakibatkan potensi pencemaran sungai. Lokasi kejadian untuk tempat samoaah yang dipinggir sungai itu bisa menimbulkan pencemaran,” jelasnya.

Dia pun menegaskan garis sempadan sungai merupakan kekayaan negara. Tidak boleh ada pihak atau kelompok yang menguasainya.

Maka, Pemkot Tangerang pun juga wajib melakukan pengawasan agar lokasi tersebut tidak dimanfaatkan secara ilegal. Apalagi yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

“Kami dari BBWSCC itu diberi tugas untuk mengelola garis sempadan sungai ini. Tapi itu bukan kami memiliki. Dan kewajiban kita bersama untuk menjaga,” katanya.

“Menurut saya, kalau melihat pelanggaran seperti itu harusnya ditindak dari awal bukan dibiarkan,” tuntas. ● pp

Gubernur Banten Larang Anak di Bawah 12 Tahun Masuk Mal

SERANG (IM) - Gubernur Banten, Wahidin Halim, belum leluasa membebaskan aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik. Terlebih khusus untuk anal di bawah usia 12 tahun.

Menurutnya, anak usia dibawah 12 tahun belum paham betul ihwal bahaya Covid-19 dan cara penanganannya. Sehingga, anak-anak masih dilarang masuk mal.

la menyatakan, kondisi Provinsi Banten relatif berbeda dengan kota-kota besar, seperti Jakarta. Untuk itu, pihaknya akan melakukan kajian

guna menelaah keamanan.

“Kalau anak kecil lari-larian, ya kita lihat dulu. Kalau di Banten tidak relatif dibuka seperti di Jakarta,” katanya, Kamis (23/9).

Bahkan, orang yang kerap disapa WH itu mengaku telah berdialog meminta agar anak berusia di bawah 12 tahun tidak dulu dibolehkan masuk mal.

“Saya bilang, di beberapa kota untuk anak 12 tahun boleh. Tapi saya bilang (ke Presiden), pak kalau bisa jangan dulu, tunggu satu, dua minggu,” terangnya. ● pp

Dipolisikan, Anggota DPRD Tangerang Epa Emilia Bantah Aniaya Warga

TANGERANG (IM) - Anggota DPRD Kota Tangerang Fraksi PDIP, Epa Emilia akhirnya buka suara soal tuduhan penganiayaan kepada warga. Epa membantah keras tuduhan penganiayaan warga inisial J (26) itu.

Epa Emilia pun melaporkan balik J itu ke pihak kepolisian. Epa mengatakan dirinya melapor ke polisi sesuai dengan fakta. “Saya sudah melaporkan balik (ke polisi) sesuai fakta,” ujar Epa Emilia, Kamis (23/9). Bahkan Epa Emilia menyebut dirinyalah yang menjadi korban pemukulan oleh J. Epa juga menjelaskan pria bernama Pabuadi saat itu berusaha menolongnya.

“Saya yang dianiaya, dipukul. Pabuadi menolong. Ini saya klarifikasi internal partai dulu. Nanti saya jelaskan,” katanya.

Sebelumnya, seorang anggota DPRD Kota Tangerang, Epa Emilia dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan. Korban, pria berinisial J (26), diduga menggunakan gagang senjata api (senpi).

Informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Minggu (19/9) di Kelurahan Kedaung Wetan, Negla-

sari, Tangerang. Dalam laporan polisi, korban menyebutkan Epa Emilia bersama seorang pria berinisial P melakukan pengerojukan kepadanya.

Dalam laporan polisi tersebut, Epa Emilia disebutkan menganiaya korban menggunakan senjata api. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian pipi dan luka sobek di bagian kepala.

J melaporkan dugaan penganiayaan itu ke Polres Metro Tangerang Kota. Laporan J tertuang dalam bukti tanda laporan bernomor : LP/B/1034/IX/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/ Polda Metro Jaya.

Ketua DPC PDIP Kota Tangerang, Gatot Wibobo mengaku belum mengetahui kronologi peristiwa itu. Gatot mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Epa Emilia hari ini.

“Kamis nanti klarifikasi, nanti kita baru tahu. Sementara itu dulu, hari Kamis kita panggil untuk klarifikasi. Kita kan internal karena kita belum dapat aduan dari eksternal. Kita mau minta klarifikasi di internal dulu,” ucap Gatot dihubungi, Rabu (22/9) kemarin. ● pp



PENGOPERASIAN KEMBALI KERETA API LOKAL DI BANDUNG

Calon penumpang menunggu kereta api lokal tujuan Purwakarta di Stasiun Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung kembali mengoperasikan kereta api lokal Bandung Raya dengan kapasitas tempat duduk 50 persen serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi penumpang.



PRODUKSI CHIPS PORANG KERING DI MADIUN

Pekerja menjemur chips (irisan tipis) porang di Kresek, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (23/9/2021). Sebagian tengkulak memproses umbi porang untuk diproduksi menjadi chips porang kering sebelum dijual ke pabrik untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga umbi basah Rp5.500 per kilogram bila dijual dalam bentuk chips kering Rp38 ribu per kilogram, atau penyusutan 85 persen dari 100 kilogram umbi basah menjadi 15 kilogram chips kering.

Pemkot Tangsel Buat Aturan Baru Perpanjangan PPKM Level 3

TANGSEL (IM) - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 yang berlangsung hingga 4 Oktober 2021. Dalam perpanjangan kali ini, Pemkot Tangsel memberlakukan penyesuaian sejumlah aturan pelanggaran.

Hal itu tertuang di dalam Surat Edaran Wali Kota Tangsel nomor Nomor 443/3314/Huk tentang Perpanjangan PPKM Level 3 Covid-19. Jika dibandingkan dengan SE Wali Kota Tangsel sebelumnya, yakni Nomor 443/3224/Huk, ada beberapa aturan yang berbeda pada beleid terbaru.

Di antaranya, kegiatan bekerja pada sektor nonesensial pada SE sebelumnya ditentukan 100 persen work from home (WFH). Pada SE terbaru aturannya tidak sepenuhnya WFH.

“Pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial dilakukan 25 persen work from office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja,” bunyi SE tersebut, dikutip Kamis (23/9).

Selain itu, sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberi pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dinaikkan persentase WFO dari 50 persen menjadi 75 persen.

Di SE yang baru terdapat aturan jam operasional bagi restoran/rumah makan dan kafe yang dimulai dari malam hari. Aturannya yakni jam operasional berlaku maksimal hingga pukul 00.00 waktu setempat. “Jam operasional pukul 18.00 sampai dengan maksimal pukul 00.00 waktu setempat. Dengan kapasitas maksimal 25 persen, satu meja maksimal dua orang, waktu makan maksimal 60 menit,” tulis SE itu.

Selanjutnya, ada peningkatan kapasitas pada kegiatan lokakarya atau seminar yang dilaksanakan di hotel, restoran, atau gedung pertemuan dari sebelumnya 30 persen menjadi 50 persen.

“Lokakarya/seminar/rapat/pertemuan dapat dilaksanakan di hotel, restoran, atau ruang/gedung pertemuan peserta paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” terangnya. ● pp